

HAMBATAN STRUKTURAL DALAM AKSES PENDIDIKAN TINGGI BAGI KELUARGA BERPENGHASILAN RENDAH

Wisnu Adji Yusuf Syahputra¹, Nur Khasanah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan
email: wisnuadjys@gmail.com¹, nur.khasanah@uingusdur.ac.id²

Abstrak

Akses terhadap pendidikan tinggi merupakan faktor penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Namun, keluarga berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah serta dampaknya terhadap mobilitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, dengan sumber data berupa buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hambatan struktural mencakup faktor ekonomi, kebijakan dan sistem pendidikan, serta faktor sosial dan kultural yang saling berkaitan. Tingginya biaya pendidikan, ketimpangan kualitas pendidikan sebelumnya, keterbatasan kebijakan afirmasi, serta rendahnya modal sosial dan budaya menjadi faktor utama yang memperkuat ketimpangan akses. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi pendidikan tinggi dan terhambatnya mobilitas sosial keluarga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk mengatasi hambatan struktural secara komprehensif.

Kata kunci: akses pendidikan tinggi; hambatan struktural; keluarga berpenghasilan rendah

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 75
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/sindoro.v1i2.360
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas mobilitas sosial masyarakat. Melalui pendidikan tinggi, individu diharapkan mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Haikal, 2025). Keluarga berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai keterbatasan yang bersifat sistemik, sehingga peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi menjadi relatif lebih kecil dibandingkan kelompok ekonomi menengah ke atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi sarana pemerataan kesempatan, justru berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial (Nadya, 2025).

Hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya motivasi individu, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural yang melekat dalam sistem pendidikan dan sosial. Biaya pendidikan yang tinggi, termasuk biaya kuliah, biaya hidup, serta biaya pendukung lainnya, menjadi beban berat bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Selain itu, ketimpangan kualitas pendidikan di jenjang sebelumnya turut memengaruhi kesiapan akademik calon mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Akibatnya, meskipun secara formal akses pendidikan tinggi terbuka,

secara substantif peluang tersebut tidak dapat diakses secara setara oleh semua kelompok masyarakat (Mega, 2022).

Di samping faktor ekonomi, kebijakan dan tata kelola pendidikan tinggi juga berkontribusi terhadap munculnya hambatan struktural. Skema bantuan pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau kelompok sasaran, keterbatasan informasi mengenai beasiswa, serta mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu memperkuat ketimpangan akses (Mega, 2022). Kondisi ini diperparah oleh perbedaan modal sosial dan modal budaya antar kelompok masyarakat, di mana keluarga berpenghasilan rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi, dukungan, dan jaringan yang diperlukan untuk menavigasi sistem pendidikan tinggi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas ketimpangan pendidikan dan pengaruh faktor ekonomi terhadap partisipasi pendidikan tinggi. Namun, sebagian kajian masih menempatkan permasalahan akses sebagai persoalan individual, tanpa mengkaji secara mendalam dimensi struktural yang membentuk dan mempertahankan ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menempatkan hambatan akses pendidikan tinggi dalam kerangka struktural, sehingga permasalahan ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial dan kebijakan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor sistemik yang memengaruhi ketimpangan akses pendidikan tinggi, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (Cresswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah melalui penafsiran terhadap konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu. Metode *library research* memungkinkan peneliti untuk menggali data non-empiris yang bersumber dari literatur ilmiah, seperti buku akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Dengan metode ini, fenomena ketimpangan akses pendidikan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan, dan konteks sosial yang lebih luas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas akses pendidikan tinggi, ketimpangan sosial, dan keluarga berpenghasilan rendah, sedangkan sumber sekunder meliputi buku teks, laporan resmi lembaga pemerintah, serta publikasi organisasi pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci yang relevan, kemudian data dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang berkaitan dengan hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terstruktur.

Hasil dan Diskusi**Konsep Hambatan Struktural dalam Pendidikan Tinggi**

Hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi merujuk pada berbagai kendala sistemik yang tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan pendidikan, sehingga membatasi peluang kelompok tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hambatan ini tidak bersifat individual, melainkan terbentuk melalui mekanisme sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dan memengaruhi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak proporsional. Dalam konteks pendidikan tinggi, struktur tersebut mencakup sistem pembiayaan, mekanisme seleksi masuk, distribusi institusi pendidikan, serta kebijakan afirmasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi sosial ekonomi calon mahasiswa (Abrar, 2025).

Secara ekonomi, hambatan struktural muncul melalui tingginya biaya pendidikan dan biaya tidak langsung yang harus ditanggung mahasiswa dan keluarganya. Biaya tersebut tidak hanya mencakup uang kuliah, tetapi juga biaya hidup, transportasi, buku, dan kebutuhan akademik lainnya. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kondisi ini menciptakan dilema antara memenuhi kebutuhan dasar dan membiayai pendidikan tinggi. Akibatnya, keputusan untuk melanjutkan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi jangka pendek, yang pada akhirnya membatasi akses kelompok miskin terhadap pendidikan tinggi secara struktural, meskipun secara formal peluang tersebut tersedia (Daniel, 2024).

Selain faktor ekonomi, hambatan struktural juga berkaitan dengan ketimpangan modal sosial dan modal budaya. Keluarga berpenghasilan rendah umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi mengenai jalur masuk perguruan tinggi, beasiswa, serta strategi akademik yang diperlukan untuk bersaing dalam sistem seleksi. Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya kesiapan dan kepercayaan diri calon mahasiswa dari kelompok tersebut dalam menghadapi persaingan masuk perguruan tinggi (Haikal, 2025).

Dalam perspektif kebijakan, hambatan struktural juga tercermin dalam desain dan implementasi kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Program bantuan pendidikan dan kebijakan afirmasi sering kali menghadapi kendala dalam hal pendataan, penyaluran, dan keberlanjutan, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh keluarga berpenghasilan rendah (Nadya, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hambatan akses pendidikan tinggi bukan sekadar persoalan kemampuan individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara struktur ekonomi, sosial, dan kebijakan yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Faktor Ekonomi sebagai Hambatan Akses Pendidikan Tinggi

Faktor ekonomi merupakan salah satu hambatan paling dominan dalam menentukan akses keluarga berpenghasilan rendah terhadap pendidikan tinggi. Tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung, menjadi kendala utama yang memengaruhi keputusan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Biaya langsung meliputi uang kuliah tunggal, biaya pendaftaran, serta kebutuhan akademik seperti buku dan perlengkapan studi (Daniel, 2024). Sementara itu, biaya tidak langsung mencakup biaya hidup, transportasi, tempat tinggal, dan kesempatan pendapatan yang hilang karena individu memilih berkuliah daripada bekerja. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akumulasi biaya tersebut menciptakan beban ekonomi yang sulit ditanggung secara berkelanjutan (Nadya, 2025).

Keterbatasan ekonomi juga berdampak pada rendahnya kesiapan akademik calon mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi yang terbatas sering kali membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas pada jenjang sebelumnya, seperti sekolah dengan fasilitas memadai, bimbingan belajar, atau lingkungan belajar yang mendukung. Akibatnya, calon mahasiswa dari kelompok ini menghadapi kesenjangan kemampuan akademik ketika bersaing dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berpengaruh pada kemampuan membayar biaya pendidikan, tetapi juga membentuk kualitas dan kesiapan sumber daya manusia sejak tahap pendidikan awal (Fritz, 2025).

Selain itu, tekanan ekonomi keluarga sering mendorong individu untuk segera memasuki dunia kerja guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi demikian, pendidikan tinggi dipandang sebagai pilihan yang berisiko karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, tanpa jaminan hasil ekonomi dalam jangka pendek (Haikal, 2025). Persepsi ini memperkuat siklus ketidaksetaraan, di mana keluarga berpenghasilan rendah cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang lebih rendah. Dengan demikian, faktor ekonomi berperan sebagai hambatan struktural yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan pengambilan keputusan pendidikan dalam keluarga (Haikal, 2025).

Di sisi lain, meskipun tersedia berbagai program bantuan pendidikan, seperti beasiswa dan subsidi biaya kuliah, akses terhadap program tersebut belum sepenuhnya merata. Keterbatasan informasi, persyaratan administratif yang kompleks, serta ketidaksesuaian antara besaran bantuan dan kebutuhan riil mahasiswa menjadi kendala tersendiri bagi keluarga berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi ekonomi yang ada masih belum mampu menghapus hambatan struktural secara menyeluruh (Mega, 2022). Oleh karena itu, upaya peningkatan akses pendidikan tinggi perlu disertai dengan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Faktor Kebijakan dan Sistem Pendidikan

Kebijakan dan sistem pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah. Meskipun pemerintah telah merancang berbagai kebijakan untuk memperluas partisipasi pendidikan tinggi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala struktural (Yumi, 2023). Salah satu permasalahan utama terletak pada distribusi kesempatan yang belum merata antarwilayah dan antarperguruan tinggi. Perguruan tinggi dengan kualitas dan fasilitas yang lebih baik umumnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga calon mahasiswa dari daerah tertinggal harus menghadapi hambatan tambahan berupa biaya mobilitas dan adaptasi sosial (Mega, 2022).

Sistem seleksi masuk perguruan tinggi juga berkontribusi terhadap terbentuknya hambatan struktural. Mekanisme seleksi yang menekankan capaian akademik dan hasil ujian standar cenderung menguntungkan peserta didik yang berasal dari sekolah dengan sumber daya pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah yang menempuh pendidikan di sekolah dengan fasilitas terbatas sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem seleksi belum

sepenuhnya mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi sebagai faktor yang memengaruhi capaian akademik individu (Cpps, 2014).

Selain itu, kebijakan afirmasi dan bantuan pendidikan belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau kelompok sasaran. Permasalahan pendataan, verifikasi penerima manfaat, serta kompleksitas administrasi sering kali menjadi penghambat bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses program bantuan (Cpps, 2014). Dalam beberapa kasus, kebijakan afirmasi belum diiringi dengan pendampingan yang memadai, sehingga mahasiswa dari kelompok rentan tetap menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan studi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi tidak cukup hanya berfokus pada pembukaan akses masuk, tetapi juga perlu memastikan dukungan sistemik selama proses pendidikan berlangsung (Haikal, 2025).

Faktor Sosial dan Kultural

Faktor sosial dan kultural turut membentuk hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah. Lingkungan sosial tempat individu tumbuh berpengaruh besar terhadap cara pandang terhadap pendidikan dan aspirasi masa depan. Dalam banyak kasus, keluarga berpenghasilan rendah memiliki pengalaman terbatas dengan pendidikan tinggi, sehingga perguruan tinggi sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang jauh, sulit dijangkau, dan tidak relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Persepsi ini secara tidak langsung membatasi dorongan dan dukungan keluarga terhadap anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Haikal, 2025).

Keterbatasan modal budaya juga menjadi faktor penting dalam memperlemah akses pendidikan tinggi. Modal budaya mencakup pengetahuan, kebiasaan, serta nilai-nilai yang mendukung keberhasilan akademik, seperti kemampuan memahami sistem pendidikan, strategi belajar, dan komunikasi akademik. Keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah umumnya tidak memiliki sumber daya tersebut, sehingga anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah harus menghadapi sistem pendidikan tinggi tanpa bekal sosial dan kultural yang memadai. Kondisi ini menyebabkan mereka lebih rentan mengalami kesulitan adaptasi akademik maupun sosial ketika memasuki perguruan tinggi (Yumi, 2023).

Selain itu, modal sosial yang terbatas turut memperkuat hambatan struktural. Jaringan sosial yang sempit membatasi akses terhadap informasi mengenai peluang pendidikan, beasiswa, serta dukungan non-material yang dibutuhkan dalam proses transisi ke pendidikan tinggi. Berbeda dengan keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang umumnya memiliki jaringan luas dan akses informasi yang lebih baik, keluarga berpenghasilan rendah sering kali bergantung pada informasi yang terbatas dan tidak terstruktur. Akibatnya, peluang yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Mega, 2022).

Dampak Hambatan Struktural terhadap Mobilitas Sosial

Hambatan struktural dalam akses pendidikan tinggi memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas sosial keluarga berpenghasilan rendah. Pendidikan tinggi yang seharusnya berfungsi sebagai sarana peningkatan status sosial dan ekonomi justru sulit diakses oleh kelompok ini akibat berbagai keterbatasan sistemik (Fritz, 2025). Ketika akses terhadap pendidikan tinggi terhambat, peluang individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan stabil menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menyebabkan mobilitas sosial antargenerasi berjalan

stagnan, di mana anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung tetap berada pada posisi sosial ekonomi yang sama dengan orang tuanya (Mega, 2022).

Hambatan struktural tersebut berkontribusi pada reproduksi ketimpangan sosial dalam jangka panjang. Ketimpangan akses pendidikan tinggi menciptakan kesenjangan dalam penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan modal sosial yang dibutuhkan di pasar kerja. Akibatnya, kelompok masyarakat dengan akses pendidikan yang lebih baik terus memperoleh keuntungan struktural, sementara keluarga berpenghasilan rendah mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memengaruhi pembangunan sosial secara keseluruhan karena potensi sumber daya manusia tidak dapat dikembangkan secara optimal (Yumi, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hambatan akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah bersifat struktural dan multidimensional. Faktor ekonomi, kebijakan dan sistem pendidikan, serta faktor sosial dan kultural saling berinteraksi dalam membentuk ketimpangan akses pendidikan tinggi. Hambatan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kegagalan individu semata, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur sosial dan kebijakan yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan dan pemerataan kesempatan pendidikan.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi keluarga berpenghasilan rendah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan pendidikan perlu dirancang tidak hanya untuk membuka akses masuk, tetapi juga memastikan dukungan akademik, ekonomi, dan sosial selama proses pendidikan berlangsung. Dengan mengatasi hambatan struktural secara sistemik, pendidikan tinggi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen mobilitas sosial dan pengurangan ketimpangan dalam masyarakat.

Referensi

- Abrar, M. (2025). Inovasi dalam Riset Akademik: Strategi Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Penelitian Perguruan Tinggi. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 5(2).
- Cpps. (2014, 04 21). *Siswa Miskin Tertinggal: Buka Akses Pendidikan Menengah dan Tinggi*. From CPPS UGM: <https://cpps.ugm.ac.id/siswa-miskin-tertinggal-buka-akses-pendidikan-menengah-dan-tinggi/>
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Daniel, Y. B. (2024). Masalah Ketimpangan Pendidikan Indonesia dengan Kajian Struktural Fungsional Robert K. Merton. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 2670-2680.
- Fritz, H. S. (2025). Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan: Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2).

- Haikal, E. &. (2025). Ketimpangan Sosial Ekonomi dan Akses Pendidikan: Studi Kasus Masyarakat Marginal. *Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series*, 1(2), 127-131.
- Mega, W. R. (2022). The role of social factors in access to and equity in higher education for students with low socioeconomic status: A case study from Indonesia. *Sage Journals*, 2(1). doi:<https://doi.org/10.1177/27526461221140570>
- Nadya, C. A. (2025). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Angka Putus Sekolah di Kecamatan Sumbang. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 84-92. doi:10.51903/jupea.v5i1.4502
- Yumi, H. E. (2023). Pendidikan bagi masyarakat miskin di Yogyakarta. *JIPSINDO: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 10(01), 11-24. doi:<https://doi.org/10.21831/jipsindo.v10i1.51142>